

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Tenaga kerja sebagai salah satu dari faktor produksi merupakan unsur yang penting dan paling berpengaruh dalam mengelola dan mengendalikan sistem ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi maupun investasi. Keterlibatannya dalam proses produksi menyebabkan mereka menginginkan pendapatan yang memadai, tingkat keamanan dan kenyamanan kerja, serta keuntungan lain yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya. Dimana manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan, dan juga merupakan konsumen hasil pembangunan itu sendiri.

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di berbagai sektor. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya demografi. Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Hal ini dapat pula mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah.

Menurut Handoko (1985) penyerapan tenaga kerja sebagai jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Terjadinya penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja.

Menurut Kuncoro (2003), penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi oleh banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Dalam dunia usaha tidak memungkinkan mempengaruhi kondisi tersebut, maka hanya pemerintah yang dapat menangani dan mempengaruhi faktor eksternal.

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Menurut Sadono Sukirno (2002) tenaga kerja bukan berarti jumlah buruh yang terdapat dalam perekonomian, tetapi tenaga kerja juga meliputi keahlian dan keterampilan yang mereka miliki.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat 2, menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh upah untuk mencukupi kebutuhan hidup layak (KHL) tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja

yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat (Hardijan Rusli, 2011). Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Seiring dengan berubahnya lingkungan makro ekonomi mayoritas negara-negara berkembang, angka pengangguran yang meningkat pesat terutama disebabkan oleh terbatasnya permintaan tenaga kerja, faktor-faktor eksternal seperti memburuknya kondisi neraca pembayaran, meningkatnya masalah utang luar negeri dan kebijakan lainnya, yang pada akhirnya telah mengakibatkan kemerosotan pertumbuhan industri, tingkat upah, dan akhirnya, penyediaan lapangan kerja (Todaro, 2000).

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan Ekonomi bergantung dari pertumbuhan ekonomi dimana pembangunan ekonomi mendorong dalam tumbuhnya ekonomi dan sebaliknya pula, ekonomi memperlancar dalam proses pembangunan ekonomi.

Proses pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih bermutu. (Arsyad, 2010) menyatakan bahwa pembangunan industri merupakan suatu fungsi dari tujuan

pokok kesejahteraan rakyat, bukan merupakan kegiatan yang mandiri untuk hanya sekedar mencapai fisik saja. Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan (Dumairy, 1996).

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan salah satunya dengan cara mengedepankan sektor industri. Sektor industri adalah sektor yang saat ini berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan PDB tahunan Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang juga aktif dalam mengembangkan perindustriannya. Keseriusan negara ini dalam menjalankan pembangunan industri dapat dilihat dalam visi pembangunan jangka panjang tahun 2025 yang ditetapkan yaitu “Membawa Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh Dunia”. Oleh karenanya, sektor industri pengolahan menjadi sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Keberhasilan sektor ini dapat terlihat dari kontribusinya yang besar terhadap PDB nasional selama tahun 2012-2015. Selama periode tersebut, sektor industri pengolahan menduduki peringkat pertama dalam pembentukan PDB Indonesia, yaitu sebesar Rp 1.697.787,2 miliar, Rp 1.771.961,9 miliar, dan Rp 1.854.256,7 miliar (BPS 2016). Selanjutnya, peringkat kedua ditempati oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran dan sektor pertanian menempati peringkat ketiga dalam kurun waktu yang sama. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang

berkontribusi besar terhadap pembentukan PDB nasional. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran sektor industri pengolahan di daerah ini. Sebanyak 60 persen sektor industri pengolahan berlokasi di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi Jawa Barat merupakan sentra perindustrian nasional. Industri nasional dan multinasional yang berkembang di daerah ini, diantaranya adalah industri tekstil dan garmen, elektronik, kulit, pengolahan makanan, furnitur, pesawat, mobil, panas bumi dan gas, obat-obatan, dan petrokimia. Faktor-faktor pendukung berkembangnya industri di daerah ini adalah sumber daya dan jumlah tenaga kerja yang cukup, infrastruktur yang memadai, pasar yang potensial, serta letak geografisnya yang strategis.

Tabel 1.1.

Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Pulau Jawa (persen), Tahun 2013-2015

Provinsi	Tahun		
	2013	2014	2015
Jawa Barat	43.22	43.64	43.07
Banten	37.30	34.70	33.52
Jawa Tengah	35.21	35.67	35.08
Jawa Timur	28.79	28.95	29.31
DI Yogyakarta	13.62	13.59	13.11
DKI Jakarta	13.54	13.57	13.80
P.Jawa	29.13	29.03	28.77

Sumber : BPS, PDRB Provinsi - Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017

Pada tabel 1.1. dapat dilihat bahwa sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB Jawa Barat dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Jawa yaitu selalu mencapai angka diatas 40 persen pada periode 2013-2015. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan dari Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1.2.

Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2010-2015

Keterangan	Satuan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Industri	(Unit)	6029	5861	6052	6457	6633	6874
Laju Pertumbuhan Industri	(Persen)	3.17	6.24	3.94	7.19	5.11	4.42
Penyerapan Tenaga Kerja	(Persen)	20	20.46	21.09	21.01	20.3	21

Sumber : BPS, Jawa Barat Dalam Angka 2011-2016 (diolah)

Pada tabel 1.2. terlihat bahwa jumlah industri, pertumbuhan sektor industri dan penyerapan tenaga kerja sektor industri Provinsi Jawa Barat tidak selalu berjalan dalam tren yang sama. Bertambahnya jumlah industri dari tahun ke tahun tidak sejalan dengan pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerjanya yang selalu mengalami fluktuasi. Dari segi penyerapan tenaga kerja industri pengolahan menempati posisi kedua yaitu menyerap tenaga kerja sebesar 21 persen dibawah sektor perdagangan yang mencapai 27,15 persen.

Pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan penambahan angkatan kerja telah menimbulkan masalah tersendiri. Dengan adanya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk yang terus bertambah hingga menumpuk pada usia produktif dan

peningkatan jumlah angkatan kerja tanpa diikuti dengan penyediaan lapangan kerja akan mengakibatkan kesempatan kerja berkurang dan jumlah pengangguran semakin bertambah seperti dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3.

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, TPAK, dan Tingkat Pengangguran di Jawa Barat (Jiwa), Tahun 2010-2015

Jenis Kegiatan Utama	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Angkatan Kerja	18,893,835	19,356,624	20,150,094	20,620,610	21,006,139	20,586,356
1. Bekerja	16,942,444	17,454,781	18,321,108	18,731,943	19,230,943	18,791,482
2. Penganggur	1,951,391	1,901,843	1,828,986	1,888,667	1,775,196	1,794,874
II. Bukan Angkatan Kerja	11,394,174	11,727,527	11,444,047	12,204,427	12,459,207	13,531,127
Jumlah/Total	30,288,009	31,084,151	31,594,141	32,825,037	33,465,346	34,117,483
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62.38	62.27	63.78	62.82	62.77	60.34
Tingkat Pengangguran	10.33	9.83	9.08	9.16	8.45	8.72

Sumber : BPS, Jawa Barat Dalam Angka 2011-2016 (diolah)

Dari kondisi seperti yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peran negara dalam menyediakan lapangan usaha pada sektor formal masih sangat rendah. Oleh karena itu perlu adanya langkah-langkah yang tepat, guna meningkatkan perekonomian agar pemerataan pembangunan dapat segera terwujud. Salah satu hal yang relevan dalam hal ini adalah dengan mengelola dan

memberdayakan sektor-sektor andalan dengan efektif guna memperoleh hasil yang optimal.

Kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tingkat perkembangan penduduk yang akhirnya dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka akan kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Jika penduduk tersebut dapat memperoleh pekerjaan, maka hal ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsanya. Tetapi jika tidak memperoleh pekerjaan berarti mereka akan menganggur, dan justru akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah (Irawan dan Suparmoko, 2002).

Selain itu dunia ketenagakerjaan tidak lepas dari masalah tingkat upah. Kebijakan-kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk dapat menjamin taraf kehidupan yang layak bagi tenagakerja diantaranya melalui tingkat upah. Definisi upah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ada pasal 1 ayat 30 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau/jasa yang telah atau akan dilakukan”. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan mengenai upah minimum. Tingkat upah minimum

ditetapkan secara sektoral dan regional. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER03/MEN/1997 tentang Upah Minimum Regional Bab I Pasal 1 ayat (a) menyebutkan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap di wilayah tertentu dalam suatu propinsi. Tingkat UMR dibagi menjadi tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK). Kebijakan upah minimum hanya dikenakan pada pekerja *unskill* atau buruh khususnya pada sektor manufaktur.

Pada dasarnya tujuan dari penetapan kebijakan ini adalah untuk melindungi pekerja agar upahnya tidak dibayarkan lebih rendah dari tingkat upah minimum yang ditetapkan sehingga menjamin kemakmuran bagi tenaga kerja. Selain itu, upah minimum juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Upah bagi perusahaan merupakan biaya yang harus dikeluarkan. Teori permintaan tenaga kerja menunjukkan hubungan negatif antara tingkat upah dengan penyerapan tenaga kerja. Kenaikan upah minimum akan meningkatkan biaya perusahaan yang akhirnya berdampak pada kenaikan harga per unit barang yang diproduksi. Kenaikan harga barang ini akan mengurangi permintaan atau konsumsi barang yang berakibat pada banyaknya barang yang tidak terjual, sehingga produsen terpaksa menurunkan jumlah produksinya. Penurunan jumlah produksi akan berdampak pada penurunan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Perusahaan akan lebih memilih untuk mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja dan menggantikannya dengan teknologi padat modal, seperti mesin dan lainnya, untuk proses yang lebih efisien. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan

karena tenagakerja digantikan oleh penggunaan mesin. Penurunan penyerapan tenagakerja ini nantinya akan berdampak pada beralihnya pekerja-pekerja tersebut ke sektor lain.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui hubungan antara jumlah industri, nilai output, upah dan angkatan kerja, terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010-2015”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di uraikan, maka rumusan masalah yang ingin penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh masing-masing dan keseluruhan variabel independen (Jumlah industri, Nilai Output, Upah, dan Angkatan Kerja) terhadap variabel dependen (Penyerapan Tenaga kerja) sektor industri pengolahan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimanakah perbedaan pengaruh masing-masing dan keseluruhan variabel independen (Jumlah industri, Nilai Output, Upah, dan Angkatan Kerja) terhadap variabel dependen (Penyerapan Tenaga kerja) sektor industri pengolahan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tingkat Kabupaten dan tingkat Kota?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah pokok penelitian yang telah di uraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh masing-masing dan keseluruhan variabel independen (Jumlah industri, Nilai Output, Upah, dan Angkatan Kerja) terhadap variabel dependen (Penyerapan Tenaga Kerja) sektor industri pengolahan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis perbedaan pengaruh masing-masing dan keseluruhan variabel independen (Jumlah industri, Nilai Output, Upah, dan Aangkatan Kerja) terhadap variabel dependen (Penyerapan Tenaga Kerja) sektor industri pengolahan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tingkat Kabupaten dan tingkat Kota.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Adapun manfaat teoretis dalam penelitian ini adalah memperkaya penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh pihak lain dalam hal pendalaman informasi sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam studi ilmu

Ekonomi Pembangunan, khususnya terkait perencanaan daerah dalam masalah ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat.

1.4.2. Kegunaan Empiris

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembuat keputusan atau para perumus kebijakan khususnya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal strategi pengembangan sektor industri pengolahan sebagai salah satu daya saing Provinsi Jawa Barat.